



tanjak

Navigasi Strategis BLU Sumsel 2025

**Jaga Harga: Optimis Inflasi
Terkendali**

Dari Lumbung Kecil di Gunung Raya

**Buletin Catatan
dan Jejak (tanjak)**

 **I.16 / 2025**





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Dengan dukungan
Bapak/Ibu beserta
jajaran, kami
berkomitmen
memberikan
***layanan sepenuh
hati*** melalui
***birokrasi yang
bersih dan tanpa
biaya*** (Rp0).

PENGARAH

Kepala Kanwil DJPb
Provinsi Sumatera Selatan

PENANGGUNGJAWAB

Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb
Provinsi Sumatera Selatan

KONTRIBUTOR TULISAN

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I,
Haerul Anwar, Lamhot Hasiholan Parhusip, M.
Telly Anggra Syaputra, Sephira Audrey, Suci
Amalia Putri, Yustri Marianti

DESAIN GRAFIS DAN LAYOUT

Nailah Fakhirah, Novrianto Ramadhani, Nur Rahma
Kartika, Sephira Audrey, Siti Nabila Rhamadina

SEKRETARIAT

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil
DJPb Provinsi Sumatera Selatan



Daftar Isi

Pengantar Redaksi	4
Perkembangan Ekonomi	5
Central Government Advisory	6
Navigasi Strategis BLU Sumatera Selatan 2025: Menjaga Kualitas Layanan di Tengah Arus Efisiensi Fiskal	
Local Government Advisory	9
Jaga Harga : Optimis Inflasi Terkendali Jelang Hari Libur Awal 2026	
Dari Lumbung Kecil di Gunung Raya: Kisah Transformasi Ekonomi Dimulai dari 35 Petani	
Pesona Sumsel	15
Pesona Mesjid Kiai Muara Ogan (Ki Marogan Wisata Religi dan Napak Tilas Jejak Syiar dan Dakwah Islam di Kota Palembang	
UMKM Kami	18
Souvenir Cek Ala	
Quiz Time	19
Tebak Kata	
Kanal Bebas	20
Artificial Intelligence/AI : Peluang dan Tantangan bagi DJPb	
Komik Tanjak	22
Ep. 10: Menjaga Semangat di Tahun Baru	
Kolase Triwulanan	26



Buletin tanjak menerima kiriman tulisan/naskah yang dimuat pada volume berikutnya (rubrik kanal bebas). Naskah dapat dikirimkan langsung ke alamat redaksi atau alamat email di bawah.

ALAMAT REDAKSI

Kanwil DJPb Sumsel
Gedung Keuangan Negara, Jl. Kapten A. Rival No. 2, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129

EMAIL

kanwildjpbnsumsel@kemenkeu.go.id

Kritik dan saran dapat disampaikan via email tersebut di atas.



Pengantar *Redaksi*

Salam hangat bagi para pembaca tanjak,

Tahun 2025 kini tiba di pengujungnyanya. Bagi kita di Sumatera Selatan, perjalanan setahun ini adalah manifestasi ketangguhan dalam menjaga efisiensi serta kreativitas mengelola keterbatasan. Buletin Tanjak Edisi ke-16 hadir sebagai ruang refleksi atas seluruh dedikasi Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun.

Edisi ini merangkum ulasan strategis fiskal dan ekonomi Bumi Sriwijaya, mulai dari dinamika Triwulan IV hingga kilas balik performa 2025. Kami membedah peran strategis Badan Layanan Umum (BLU) dalam menjaga kualitas layanan di tengah arus efisiensi, serta analisis pengendalian inflasi demi menjaga daya beli masyarakat menyongsong 2026.

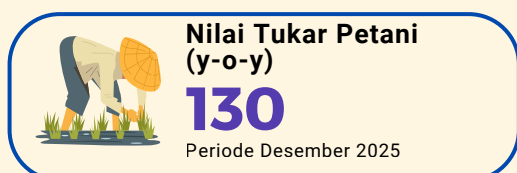
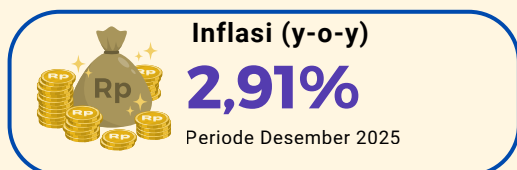
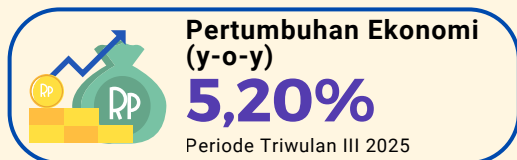
Sisi humanis juga hadir melalui kisah 35 petani kopi di Desa Gunung Raya dan wisata religi di Masjid Ki Marogan Palembang. Mari terus perkuat peran sebagai TREFA dengan semangat solusi yang inklusif dan inovatif.

Selamat menutup tahun dengan kebanggaan. Mari sambut peluang 2026 dengan persiapan yang lebih matang.

Rahmadi Murwanto
Kepala Kantor Wilayah
DJPb Provinsi Sumatera
Selatan

Dashboard Kinerja Ekonomi s.d. 31 Desember 2025

Indikator Makro Ekonomi & Kesejahteraan



Pertumbuhan ekonomi Sumsel tetap **solid** di atas 5%, inflasi kembali meningkat, serta pasar kerja menunjukkan perbaikan struktural

Tabel I-Account APBN Sumsel Desember 2024-2025

Uraian (Rp Miliar)	s.d. Desember 2024			s.d. Desember 2025			
	Target/Pagu	Realisasi	%	Target/Pagu	Realisasi	%	Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	22.455,30	16.410,73	73,08%	17.519,50	16.451,73	93,91%	0,25%
I. Penerimaan Perpajakan	20.074,82	12.666,37	63,10%	15.065,61	13.707,05	90,98%	8,22%
1. Penerimaan Pajak	19.743,59	12.323,60	62,42%	14.892,76	13.224,32	88,80%	7,31%
2. Kepabeanan & Cukai	331,22	342,77	103,49%	172,86	482,73	279,26%	40,83%
II. PNPB	2.380,48	3.744,35	157,29%	2.453,89	2.744,68	111,85%	-26,70%
B. BELANJA NEGARA	54.651,63	52.936,83	96,86%	50.634,35	48.253,29	95,30%	-8,85%
I. Belanja Pemerintah Pusat	21.158,33	19.842,51	93,78%	15.658,62	14.490,10	92,54%	-26,97%
II. Transfer ke Daerah	33.493,29	33.094,32	98,81%	34.975,73	33.763,19	96,53%	2,02%
C. SURPLUS/DEFISIT	-32.196,33	-36.526,10	113,45%	-33.114,84	-31.801,56	96,03%	-12,93%

Hingga Desember 2025, peningkatan pendapatan negara didorong oleh implementasi sistem pajak baru dan ekspor. Namun, terdapat penurunan kinerja belanja barang dan modal. Selain itu, anggaran Pemilu/Pilkada 2024 juga berkontribusi pada kontraksi belanja barang, yang menyebabkan penurunan tren kinerja belanja pemerintah pusat secara keseluruhan.



Navigasi Strategis BLU Sumatera Selatan 2025: Menjaga Kualitas Layanan di Tengah Arus Efisiensi Fiskal

oleh Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

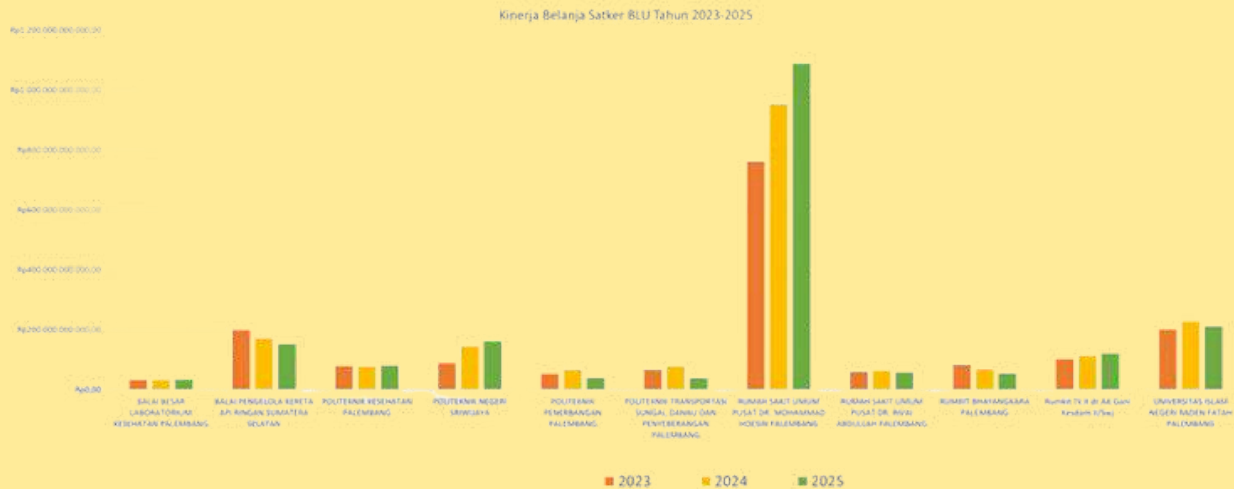
Selama ini, pandangan umum sering kali menganggap bahwa kelancaran operasional instansi pemerintah sepenuhnya bergantung pada ketersediaan pagu belanja yang bersumber dari APBN.

Namun, dalam ekosistem Badan Layanan Umum (BLU), fleksibilitas pengelolaan keuangan menjadi kunci utama yang memungkinkan satker untuk tetap melaju meski dihadapkan pada efisiensi anggaran. Memasuki tahun 2025, kebijakan efisiensi belanja melalui mekanisme blokir anggaran muncul sebagai instrumen baru yang menguji kemandirian fiskal satker BLU di wilayah Sumatera Selatan. Kurangnya pemahaman mengenai peran saldo awal dan optimalisasi pendapatan mandiri sering kali membuat publik meragukan keberlangsungan layanan saat efisiensi diterapkan.

Melalui tulisan ini, diangkat pembahasan mengenai respon berbagai rumpun BLU, mulai dari rumpun kesehatan hingga rumpun pendidikan terhadap kebijakan efisiensi tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memotret bagaimana fleksibilitas BLU mampu menyeimbangkan antara keterbatasan ruang belanja dengan tuntutan layanan publik yang tetap prima. Fokus pembahasan akan diarahkan pada kinerja belanja dan pertumbuhan pendapatan pada satker BLU di Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2023 hingga 2025, guna melihat sejauh mana kemandirian fiskal telah terbentuk sebagai fondasi ketahanan layanan publik.

Bagaimana performa tiap rumpun dalam menghadapi tantangan ini? Berikut adalah ulasan mendalam mengenai kinerja belanja dan pendapatan BLU periode 2023-2025.

Resiliensi dan Adaptasi di Tengah Efisiensi



Sumber: sintesa.kemenu.go.id

Rumpun kesehatan tampil sebagai garda terdepan dalam menunjukkan ketahanan fiskal yang paling kokoh di wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan tren periode 2023-2025, satker seperti RSUP Dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang mencatatkan dominasi belanja yang terus tumbuh secara signifikan. Meskipun RSMH menghadapi blokir anggaran sebesar Rp38,27 miliar yang menahan realisasi belanja di angka 67,81%, performa pendapatannya tetap stabil dan kuat pada angka 96,63% dari target. Ketangguhan ini semakin dipertegas oleh Rumkit Tk. II dr. AK Gani dan Rumkit Bhayangkara yang mampu mencatatkan realisasi belanja melampaui pagu, masing-masing sebesar 112,44% dan 161,83%, melalui pemanfaatan saldo awal BLU secara fleksibel. Fakta ini menegaskan bahwa layanan kesehatan publik memiliki kemandirian fiskal tinggi, sehingga kualitas layanan tidak bergantung sepenuhnya pada pagu belanja yang terblokir.

Dinamika yang berbeda terlihat pada rumpun pendidikan yang menunjukkan performa cenderung moderat dalam beradaptasi dengan kebijakan efisiensi. Grafik kinerja menunjukkan pertumbuhan belanja yang stabil pada UIN Raden Fatah, yang mencatat realisasi tertinggi di rumpunnya sebesar 84,14%, serta peningkatan pada Politeknik Negeri Sriwijaya meskipun masih berada pada level menengah

Di sisi lain, satker seperti Politeknik Kesehatan dan Politeknik Negeri Sriwijaya menghadapi tantangan blokir yang membatasi ruang gerak eksekusi kegiatan, dengan realisasi belanja tertahan di kisaran 63% hingga 68%. Meskipun beberapa satker mampu melampaui target pendapatan, penggunaan saldo awal pada rumpun pendidikan belum sepenuhnya optimal dalam mendorong percepatan belanja guna mengompensasi dampak kebijakan blokir tersebut.

Sementara itu, tekanan fiskal paling nyata dirasakan oleh rumpun lainnya, terutama pada satker dengan pagu terbatas seperti Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS). Tren belanja BPKARSS menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Dengan adanya blokir anggaran yang cukup signifikan sebesar Rp41,48 miliar, realisasi belanja satker ini terhambat di angka 57,88%. Walaupun kinerja pendapatan masih mampu tumbuh mencapai 89,76% dari target, keterbatasan ruang fiskal ini berdampak langsung pada kecepatan eksekusi berbagai program operasional yang telah direncanakan, menyoroti tantangan besar bagi satker dengan fleksibilitas pendapatan yang masih terbatas.

Tantangan BLU dalam Mengelola Efisiensi Belanja

Meskipun fleksibilitas BLU memberikan napas bagi operasional layanan, tantangan besar tetap membayangi dalam implementasi kebijakan efisiensi ini. Pertama, terdapat ketimpangan resiliensi antar-rumpun, di mana satker kesehatan jauh lebih siap menghadapi blokir dibandingkan rumpun pendidikan dan transportasi yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada pagu anggaran negara. Kedua, optimalisasi saldo awal BLU sebagai penyangga belum berjalan seragam; pada beberapa satker, saldo awal mampu mendorong belanja, namun pada satker lain, penggunaannya belum mampu menutupi kekosongan program yang terhambat blokir. Ketiga, adanya risiko penurunan kualitas layanan jangka panjang apabila efisiensi belanja terus menekan pos-pos vital, terutama pada satker dengan pagu kecil yang ruang gerak fiskalnya sangat terbatas dalam mengeksekusi program strategis.

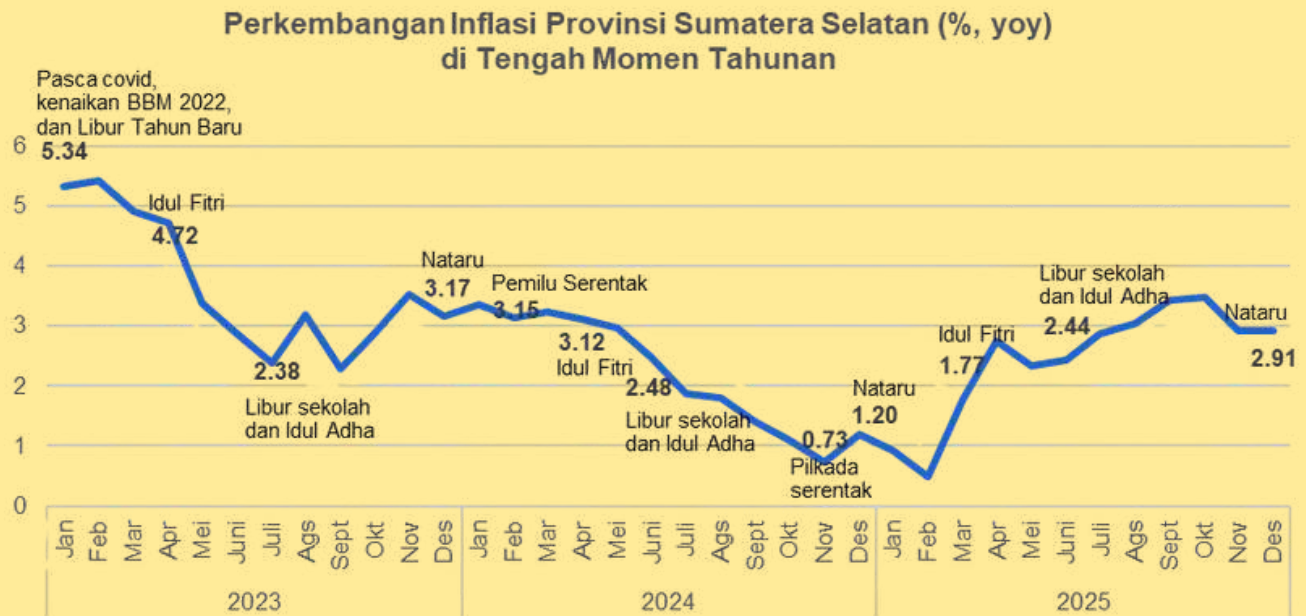
Kesimpulan

Secara keseluruhan, kinerja BLU di Sumatera Selatan sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi belanja melalui blokir anggaran lebih memengaruhi sisi pengeluaran dibandingkan kemampuan menghasilkan pendapatan. Satker yang memiliki kapasitas pendapatan mandiri yang kuat, seperti rumah sakit, terbukti memiliki ketahanan fiskal yang lebih baik karena mampu memanfaatkan fleksibilitas pengelolaan dana BLU untuk menjaga kontinuitas layanan. Sebaliknya, bagi rumpun pendidikan dan sektor lainnya, kebijakan ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap perencanaan belanja dan strategi peningkatan pendapatan mandiri.

Keberhasilan BLU melewati tantangan ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan instrumen vital untuk memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan prima tanpa harus sepenuhnya bergantung pada ketersediaan pagu belanja APBN. Dengan perbaikan perencanaan dan penguatan unit usaha, BLU di Sumatera Selatan diharapkan dapat semakin lincah dan adaptif dalam menghadapi dinamika kebijakan fiskal di masa depan.



Monev BLU oleh Kanwil DJPb Sumsel



SUMBER : BPS SUMSEL (DATA DIOLAH)

Jaga Harga : Optimis Inflasi Terkendali Jelang Hari Libur Awal 2026

oleh **Sola Fide**

Setelah libur Natal dan Tahun Baru 2025 dan menjelang perayaan Isra Mikraj, Tahun Baru Imlek, dan bulan puasa di awal tahun 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga pangan. Momentum hari besar keagamaan ini diperkirakan mendorong lonjakan konsumsi masyarakat, terutama pada komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, dan daging ayam ras.

Inflasi Terkendali, Namun Tekanan Harga Meningkat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, inflasi Desember 2025 tercatat sebesar 2,91% (year-on-year) atau 0,49% (month-to-month). Angka ini masih dalam batas sasaran nasional dan terkendali di tengah prediksi kenaikan inflasi di akhir tahun. Meski inflasi terkendali, namun tekanan harga meningkat tetap terjadi.

Komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di bulan Desember antara lain emas perhiasan, cabai merah, beras, bahan bakar rumah tangga, daging ayam ras. Kenaikan harga hortikultura pada bulan Desember dipicu gangguan pasokan akibat curah hujan tinggi, yang mengganggu produksi dan distribusi dari produsen seiring permintaan yang meningkat sejak periode Natal dan Tahun Baru.

Langkah Antisipasi TPID

TPID Sumsel mengintensifkan program stabilisasi, seperti operasi pasar murah untuk menekan potensi lonjakan harga melalui gerakan pangan murah, dan distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) bersama Perum Bulog. Hingga akhir Desember 2025, tercatat 542 operasi pasar telah digelar di seluruh kabupaten/kota di Sumsel (Detik, 10 Januari 2026).



Pemerintah daerah optimis inflasi tetap terkendali meski tekanan konsumsi meningkat menjelang hari libur awal tahun 2026 yaitu Isra Mikraj, Tahun Baru Imlek, dan bulan puasa. Menurut data histori sejak 2023, inflasi provinsi Sumatera Selatan menunjukkan pola musiman yang sangat dinamis namun tetap terkendali. Setelah mengalami lonjakan pasca pandemi di awal 2023 (5,34%), inflasi berhasil ditekan yang menunjukkan keberhasilan langkah stabilisasi inflasi. Momen hari besar keagamaan, libur sekolah, dan momen politik tidak memberikan tekanan inflasi yang signifikan karena distribusi pasokan yang tetap terjaga. Sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Bank Indonesia, pelaku usaha, dan distributor terus diperkuat untuk mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu keterjangkauan harga (K1), ketersediaan pasokan (K2), kelancaran distribusi (K3), dan komunikasi yang efektif (K4).

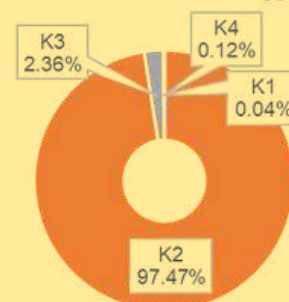
Kebijakan Fiskal tahun 2025 untuk Pengendalian Inflasi

Total pagu anggaran belanja K/L di wilayah Sumatera Selatan yang ter-tagging untuk program pengendalian inflasi mencapai Rp384,58 miliar, dengan realisasi sampai tahun 2025 mencapai Rp378,14 miliar atau 98,32%. Anggaran tersebut dialokasikan melalui program 4K, yang didominasi program ketersediaan pasokan (K2) mencapai 97,47% dan sisanya program kelancaran distribusi (K3) sebesar 2,36%, program komunikasi yang efektif (K4) sebesar 0,12%, dan program keterjangkauan harga (K1) sebesar 0,04% dari total realisasi anggaran APBN ter-tagging inflasi. Jika berdasarkan K/L, realisasi belanja pengendalian inflasi tertinggi melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang banyak memfokuskan melalui program rehabilitasi atau peningkatan prasarana irigasi untuk mendukung ketahanan pangan lokal, Bendungan Tiga Dihaji,

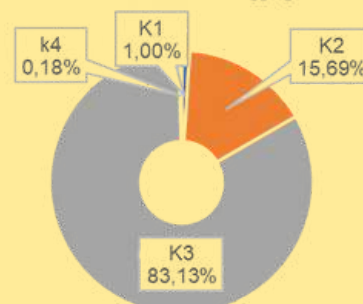
serta operasi dan pemeliharaan prasarana daerah irigasi. Jumlah realisasi ketiga program tersebut mencapai 90,96% dari total realisasi APBN ter-tagging inflasi seluruh K/L di Provinsi Sumatera Selatan.

Di sisi APBD, total realisasi belanja 2025 yang ter-tagging mendukung program pengendalian inflasi mencapai 12,92 triliun. Belanja tersebut mayoritas terealisasi dalam program Kelancaran Distribusi (K3) yang mencapai 83,13%, diikuti program Ketersediaan Pasokan (K2) sebesar 15,69%, program Keterjangkauan Harga (K1) sebesar 1%, dan program Komunikasi Efektif (K4) sebesar 0,18% dari total realisasi. Jika berdasarkan kelompok satuan kerja, realisasi belanja pengendalian inflasi tertinggi melalui kelompok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang memfokuskan melalui program penyelenggaraan jalan dan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang realisasinya mencapai 81,68% dari total realisasi APBD ter-tagging inflasi seluruh satuan kerja di Provinsi Sumatera Selatan.

Realisasi APBN 2025 Ter-Tagging Inflasi

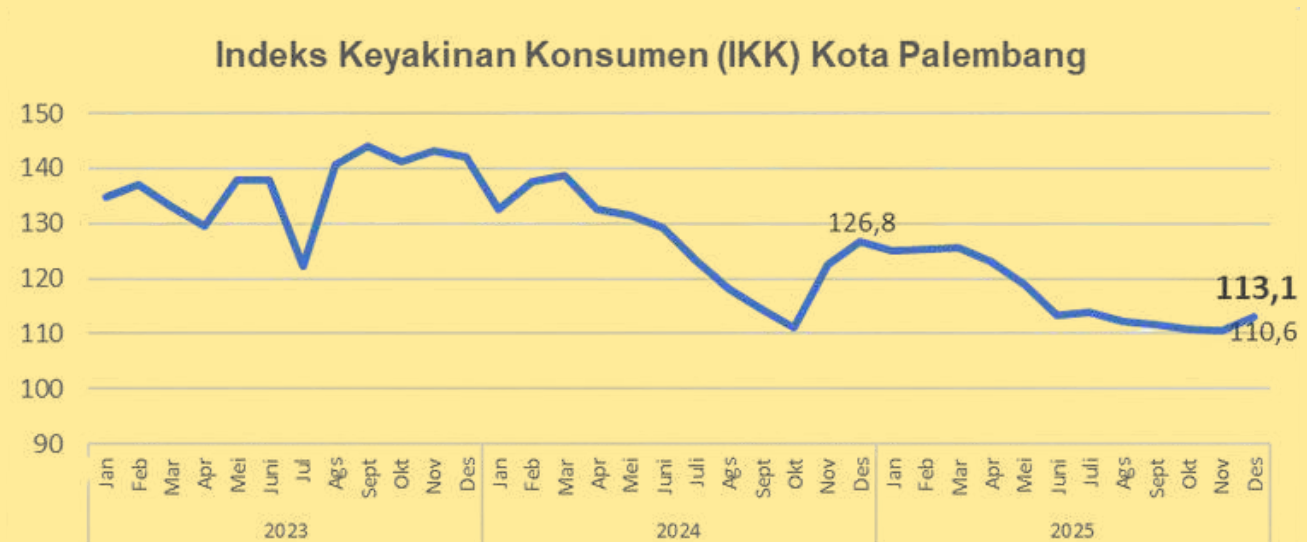


Realisasi APBD 2025 Ter-Tagging Inflasi



Sumber : Kanwil DJPb, Januari 2026 (diolah)

Menjaga Daya Beli Masyarakat



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Pengendalian inflasi menjelang hari libur nasional bukan hanya soal menjaga harga, tetapi juga memastikan daya beli masyarakat tetap kuat. Berdasarkan data Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Sumatera Selatan yang secara umum terefleksi di Kota Palembang secara konsisten berada di atas ambang batas 100, yang menunjukkan bahwa konsumen secara umum masih optimis. Namun, grafik menampilkan tren penurunan, khususnya di sepanjang tahun 2025, di mana indeks bergerak melandai dari angka 126,8 di Desember 2024 menuju titik terendah dalam tiga tahun terakhir di 110,6 pada November 2025 sebelum sedikit terkoreksi ke 113,1 di akhir tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan adanya sikap hati-hati masyarakat dalam memandang ekspektasi masa depan, sehingga diperlukan langkah strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah inflasi. Dengan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, TPID, dan pelaku usaha, Sumatera Selatan optimis mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan cuaca ekstrem dan lonjakan permintaan hari libur di awal tahun 2026.



DOKUMENTASI: CANVA

Dari Lumbung Kecil di Gunung Raya: Kisah Transformasi Ekonomi Dimulai dari 35 Petani

oleh **Haerul Anwar**

Di tengah kabut pagi yang masih menyelimuti lereng Desa Gunung Raya, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, denyut kehidupan dimulai dengan semangat yang sama seperti generasi sebelumnya: merawat pohon kopi, memetik buah merah, dan berharap harga yang baik dari pengepul. Di sini, di atas tanah seluas rata-rata 1,38 hektar per petani, 35 keluarga menggantungkan hidup pada biji Robusta. Namun, cerita lama kerap berujung pada angka yang sama: dengan produksi 800 kg green bean per hektar per tahun dan harga yang dikuasai tengkulak di kisaran Rp 58.500 per kg, pendapatan bersih mereka hanya sekitar Rp 900.000 per bulan—angka yang sulit mengangkat martabat dan menumbuhkan harapan.

Data dari proposal pengembangan usaha yang disusun oleh Tim Kanwil DJPb Sumsel mengungkap potret nyata yang memilukan sekaligus penuh harapan. Sebanyak 72% petani masih terjebak dalam sistem perdagangan yang melibatkan 4-5 lapis tengkulak, membuat

margin mereka tergerus hingga 60%. Infrastruktur jalan yang berat, kelangkaan pupuk, dan ketiadaan teknologi pascapanen presisi menjadi tembok besar yang menghalangi mereka dari kesejahteraan. Namun, di balik setiap kendala tersimpan potensi luar biasa: kopi Robusta OKU Selatan memiliki keunggulan kandungan kafein rendah (1,2%), peluang besar untuk naik kelas menjadi Fine Robusta yang dicari pasar premium global.

Di sinilah titik balik dimulai. Program Revitalisasi Kopi OKU Selatan yang diinisiasi Kanwil DJPb Sumatera Selatan melalui Tim Pemberdayaan UMKM Kopi Bumi Sriwijaya tidak hanya sekadar wacana, tetapi sebuah rancangan operasional yang detail, terukur, dan penuh keyakinan. Dengan fokus pada 35 petani percontohan di Desa Gunung Raya, program ini membangun sebuah ekosistem baru berbasis klaster dan teknologi. Intinya adalah pendirian Unit Pengolahan Bersama (UPB) yang dilengkapi mesin pulper, huller, grader,

dan pengering modern, mengubah pola jual green bean asalan menjadi sistem jual cherry merah dengan kualitas terkontrol.

Analisis finansial dalam proposal menunjukkan bahwa perubahan kecil ini mampu mengubah nasib besar. Dengan asumsi petani beralih ke sistem petik merah penuh, produksi cherry per petani bisa melonjak dari 4,8 ton menjadi 13 ton per tahun. Pendapatan kotor dari penjualan cherry ke UPB (dengan harga Rp 12.000/kg) berpotensi mencapai Rp 156 juta per tahun per petani. Setelah dikurangi biaya produksi, pendapatan bersih dari penjualan cherry saja bisa menyentuh Rp 10 juta per bulan. Belum lagi bagi hasil 70% dari laba bersih UPB yang bisa menambah Rp 4 juta per bulan per petani. Angka total pendapatan bulanan pun berubah drastis: dari Rp 900.000 menjadi Rp 14 juta—kenaikan lebih dari 1.455%.

Namun, lebih dari sekadar angka, program ini menawarkan transformasi paradigma. Petani tidak lagi sebagai price taker yang pasrah, tetapi sebagai price maker yang memahami kualitas adalah kunci. UPB tidak hanya menjadi tempat pengolahan, tetapi sekolah bersama tempat mereka belajar manajemen mutu, tata kelola keuangan, dan negosiasi pasar. Dukungan pelatihan berjenjang dari Puslitkoka Jember, pendampingan teknis dari PT Agro Tropika Nusantara, serta pendampingan keuangan dan kelembagaan dari PKN STAN membentuk fondasi pengetahuan yang berkelanjutan.

Investasi sebesar Rp 3,06 miliar untuk pembangunan UPB dan pendampingan menunjukkan kelayakan yang solid. Analisis kelayakan mengungkap angka yang menggembirakan: NPV Rp 6,1 miliar, IRR 79%, BCR 2,995, dan Payback Period hanya 14,5 bulan. Bahkan dalam skenario terburuk—harga jual turun 20% dan biaya naik 25%—proyek ini tetap layak. Ini bukan sekadar hitungan finansial, tetapi bukti bahwa model ini

tangguh, realistis, dan siap dijalankan.

Program ini juga menjadi bukti nyata sinergi multipihak. Dukungan pendanaan dari lembaga filantropi seperti BAZNAS, BPKH, dan BSI Maslahat diintegrasikan dengan peran pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan tentu saja, masyarakat petani sebagai aktor utamanya. Ini adalah wujud konkret dari peran Kanwil DJPb Sumsel sebagai Regional Chief Economist—tidak hanya mengelola anggaran, tetapi menumbuhkan nilai, tidak hanya memantau laporan, tetapi menggerakkan perubahan.

Seperti halnya biji kopi yang harus melalui proses panjang dari ceri merah hingga seduhan nikmat, transformasi ekonomi desa juga memerlukan ketekunan, inovasi, dan kolaborasi. Dari lumbung kecil di ujung Desa Gunung Raya, kita belajar bahwa perubahan besar bisa dimulai dari sebuah keyakinan: bahwa petani layak sejahtera, kopi lokal bisa go global, dan kebijakan fiskal harus berdenyut bersama jantung ekonomi rakyat.

Di setiap cangkir kopi Fine Robusta yang nanti lahir dari UPB Gunung Raya, akan terasa lebih dari sekadar rasa. Di sana ada aroma kemandirian, aftertaste kesejahteraan, dan harapan baru bahwa dari lereng-lereng terpencil, Indonesia bisa bangkit—dimulai dari 35 petani, satu klaster, dan secangkir kopi penuh makna.

Perubahan tidak selalu dimulai dari pidato atau anggaran besar. Kadang, ia lahir dari diskusi kecil di kebun, dari keberanian sekelompok petani mencoba cara baru, dan dari komitmen institusi negara untuk turun tangan. Kanwil DJPb Sumsel, melalui program ini, membuktikan bahwa uang negara bisa menjadi pupuk subur bagi kesejahteraan yang berkelanjutan. Dan di balik setiap angka dalam proposal, ada narasi optimistis: bahwa kita bisa menumbuhkan ekonomi dengan cara yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat.

Tetap
terhubung
bersama kami
dimanapun
Anda berada.



@djpbsumsel



@djpbsumsel



kanwildjpbnsmsel



djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/



Pesona Mesjid Kiai Muara Ogan (Ki Marogan) Wisata Religi dan Napak Tilas Jejak Syiar dan Dakwah Islam di Kota Palembang

Oleh Lamhot Hasiholan Parhusip

Hai Sobat Tanjak semuanya, tahukan kamu kalo Kota Palembang itu tidak hanya terkenal dengan wisata alam Sungai Musi dan wisata kuliner pempek saja loh, akan tetapi Palembang juga memiliki beberapa destinasi wisata religi yang banyak di kunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.. Nah salah satu destinasi religi yang akan kita ulas kali ini adalah Mesjid Kiai Muara Ogan atau yg lebih terkenal dengan Masjid Ki Marogan.

Lokasinya yang strategis

Masjid Ki Marogan ini adalah sebuah bangunan masjid bersejarah yang di bangun di tepian Sungai Musi. Lokasinya sangat strategis, terletak di kawasan Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Kertapati, Palembang, tepat di pertemuan aliran Sungai Musi dan Sungai Ogan.

Sejarah dan tujuan pendirian

Masjid Ki Marogan didirikan sekitar tahun 1871 Masehi (1310 Hijriah). Masjid ini didirikan oleh seorang ulama dan saudagar Palembang bernama **Ki Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud**. Adapun tujuan dari pendirian bangunan masjid ini adalah sebagai pusat syiar dan dakwah penyebaran agama Islam di wilayah Palembang pada masa penjajahan Belanda, serta sebagai tempat aktivitas keagamaan.

Karakteristik Masjid

Bagunan asli masjid Ki Marogan terbuat dari kayu unglan yang terkenal dengan kekuatan dan ketahanannya terhadap perubahan cuaca. Selain bahan yg kokoh, masjid ini juga memiliki desain yang unik karena memadukan unsur budaya Cina, Eropa, dan India

DOKUMENTASI: YOUTUBE





DOKUMENTASI: SUMSEL24.COM

Haul Akbar Masjid Ki Mraogan

Sobat Tanjak, baru baru ini Masjid Ki Marogan melaksanakan peringatan Haul Akbar ke-125 Kiai Marogan. Rangkaian kegiatan haul dilaksanakan mulai tanggal 05 - 11 Januari 2026.

Puncak Haul Akbar digelar pada Minggu 11 Januari 2026 di Palembang. Pada acara ini diawali dengan proesi pelayaran dari Masjid Lawang Kidul di Boom Baru menuju Masjid Ki Marogan di Kertapati. Hal ini merupakan perwujudan napak tilas perjalanan syiar dan dakwah penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Ki Marogan semasa hidupnya. Pelayaran ini dilaksanakan menggunakan tongkang yang di ikuti oleh puluhan perahu ketek yang membentuk formasi barisan di Sungai Musi. Bapak Herman Deru (Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Ratu Dewa (Wali Kota Palembang), dewan Pengurus masjid, Para Ulama, tokoh masyarakat Kesultanan Palembang serta ratusan warga kota Palembang turut menaiki tongkang dan perahu ketek tersebut. Di atas tongkang, peserta larut dalam lantunan sholawat, dzikir, dan doa sepanjang perjalanan.

Dalam sambutannya, Bapak Herman Deru menyampaikan bahwa Peringatan Haul Akbar Ki Marogan ini akan dijadikan sebagai agenda tahunan yang akan menjadi sarana untuk mengenang keteladana Ki Marogan serta menarik wisatawan yang ingin menikmati wisata religi di Kota Palembang.

Masjid Kiai Muara Ogan

Merupakan tempat bersejarah dan menjadi destinasi wisata religi, melalui haul Akbar Kiai Muara Ogan.





Souvenir Cek

Ala



081372055023



@Souvenir_Cek_Ala



Souvenircekala.my.canva.site



Jalan Temon Lorong Mangga No. 16, 27 Ilir Palembang

TEBAK KATA

QUIZ
TIME

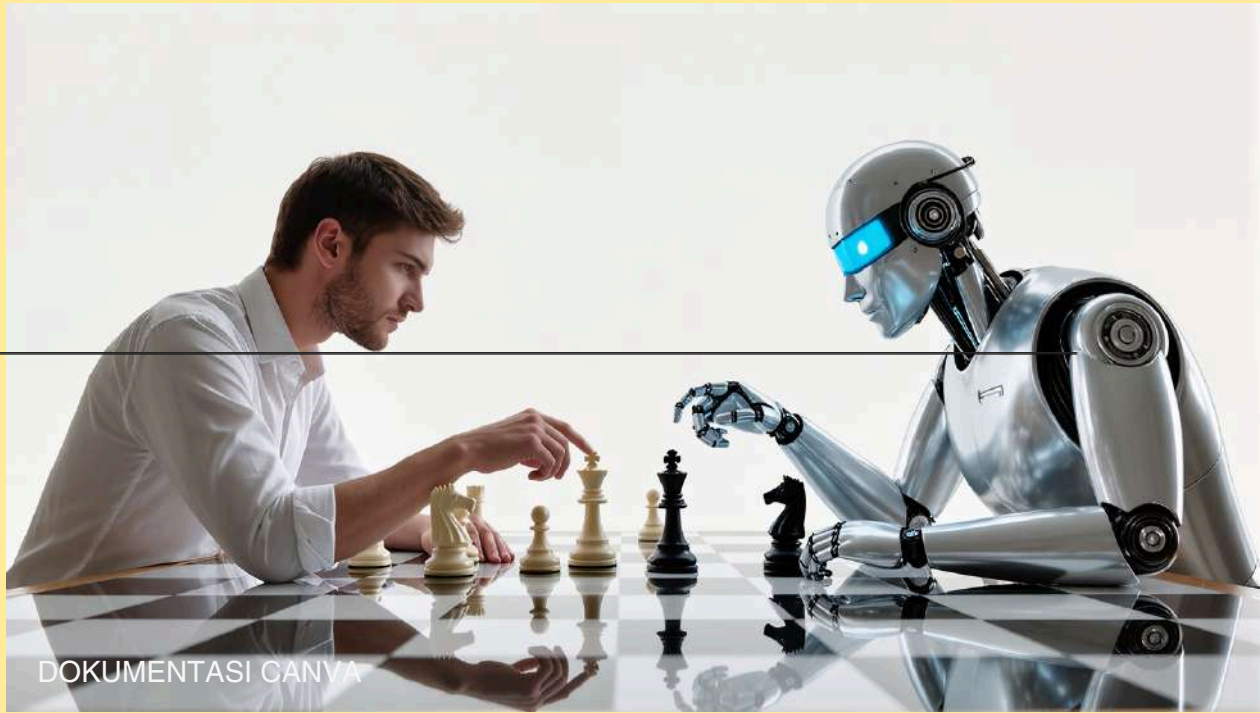
Temukan 10 kata yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara dalam kotak berikut secara vertikal, horizontal dan diagonal!

S	K	T	K	N	B	L	R	T	E
I	P	N	P	A	J	A	K	O	S
L	S	A	P	J	N	H	T	D	P
P	D	J	N	R	H	B	I	H	M
A	C	U	K	A	I	R	F	Y	K
G	E	R	D	H	B	W	A	C	E
F	B	L	E	S	A	P	B	N	V
B	E	R	I	T	H	Q	Y	P	U
K	L	K	A	U	D	I	T	E	D
O	A	Q	W	R	T	K	G	H	O
L	N	G	O	O	D	P	B	P	H
P	J	M	R	T	O	A	E	S	R
Y	A	L	U	C	K	T	W	T	G

Yuk, kirimkan jawaban kalian ke
kanwil.djpbnsmsel@kemenkeu.go.id!
Pemenang akan diumumkan di edisi
tanjak berikutnya~

Jawaban Kuis Edisi 15

- 1.PSAP
- 2.APBN
- 3.DIPA
- 4.AKRUAL
- 5.NERACA



Artificial Intelligence/AI : Peluang dan Tantangan bagi DJPb

Oleh Yustri Marianti

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) kini telah menjadi simbol kemajuan teknologi di abad ke-21. Lebih dari sekadar hasil karya sains komputer, AI mencerminkan ambisi manusia untuk menciptakan kecerdasan yang melampaui batas-batas biologis. Pengaruh AI dalam otomatisasi berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur hingga layanan publik, telah membuka lembaran baru dalam sejarah peradaban digital. Dengan dukungan algoritma yang kompleks dan pengolahan data besar, AI menawarkan efisiensi yang luar biasa sekaligus peluang inovasi yang tak terbatas.

Dalam konteks pemerintahan, termasuk di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), pemanfaatan AI dapat mendorong modernisasi sistem pengelolaan keuangan negara. Dari optimalisasi proses pencatatan dan pelaporan keuangan, pendeteksian anomali transaksi, hingga prediksi kebutuhan kas dan analisis risiko fiskal, AI

berpotensi memperkuat fungsi DJPb dalam menjalankan peran strategisnya.

Namun, perkembangan yang cepat ini tidak datang tanpa risiko. Di balik kemampuan AI yang hampir tak terhambat, terdapat paradoks etis yang semakin memerlukan perhatian. Siapa yang akan bertanggung jawab ketika keputusan yang diambil oleh AI merugikan individu atau kelompok? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa mesin tidak dijadikan alat untuk membenarkan bias manusia yang dapat tersimpan dalam data? Ketika sistem algoritmik memperpanjang ketidakadilan dan diskriminasi, kita dihadapkan pada dilema moral yang menuntut lebih dari sekadar solusi teknis kita memerlukan refleksi filosofis dan kebijakan yang visioner.

Lebih jauh lagi, tantangan signifikan yang kita hadapi adalah kurangnya regulasi yang sepadan dengan cepatnya inovasi.



Banyak negara masih terjebak dalam perdebatan mengenai norma, sementara penerapan teknologi AI terus berkembang tanpa panduan hukum yang jelas. Inisiatif seperti Artificial Intelligence Act di Uni Eropa menjadi langkah awal yang patut diapresiasi, tetapi belum cukup untuk mengatasi kompleksitas masalah global tersebut. Di satu sisi, regulasi yang terlalu ketat berpotensi menghambat kreativitas; di sisi lain, regulasi yang longgar dapat membuka peluang bagi pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk itu, membangun tata kelola AI yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik menjadi kebutuhan mendesak. Bagi DJPb, ini berarti menyusun pedoman etika penggunaan teknologi cerdas dalam pengelolaan keuangan negara, memastikan keterlibatan sumber daya manusia yang kompeten, serta menjamin bahwa penerapan AI sejalan dengan prinsip good governance.

Dalam hal ini, AI harus diposisikan sebagai mitra, bukan ancaman; sebagai alat pemberdaya, bukan pengganti. Diperlukan sinergi antara ilmuwan, pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat sipil dalam merumuskan etika digital yang kontekstual dan adaptif. Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa lompatan teknologi ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan semangat pelayanan publik yang dijunjung tinggi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.



DOKUMENTASI CANVA

KOMIK TANJAK

Ep 10: *Menjaga Semangat di Tahun Baru*

Oleh M. Telly Anggra Syaputra

Seperti manusia modern lainnya, Jaki semangat menyambut tahun baru dengan berbagai resolusi..





Lalu datang senior Yono menyapa Jaki yang sedang melamun..



HIDUP MEMANG PENUH
KETIDAKPASTIAN JAK.
AYO JALANI TAHUN BARU INI DENGAN
OPTIMIS. APAPUN YANG AKAN MUDAH-
MUDAHAN BISA DIHADAPI...
SYUKUR-SYUKUR AKAN ADA HAL BAIK
AKAN DATANG.

KALO PESIMIS, SEMUA
AKAN JADI LEBIH SULIT.
MENDING MANA? MENDING
OPTIMIS KAN?





to be continued...

“Mending percaya sama harapan sendiri, daripada sama kamu harapannya palsu melulu..”

-Senior Yono-

Kilas Balik: Triwulan IV 2025

14 OKT | KOORDINASI MOCK UP KOPERASI

Kanwil DJPb Provinsi Sumsel bersama KPPN Palembang melakukan kunjungan ke Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sidodadi di Jl. Lukman Idris, Sukodadi, Sukarami, Palembang. Kanwil DJPb Provinsi Sumsel juga menerima kunjungan dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Surya Adi di Ogan Komering Ilir.



21 OKT | FIELD EVALUATION WBBM

Untuk memastikan keberlanjutan predikat WBBM, DJPb Sumsel mendapatkan kunjungan monitoring dan evaluasi dari Itjen Kemenkeu. Kegiatan ini mengevaluasi komitmen peningkatan kualitas layanan, pengembangan inovasi, serta peran aktif seluruh pegawai dan pemangku kepentingan dalam menjaga integritas dan budaya pelayanan prima secara berkelanjutan.



29 OKT | TREASUMSELFEST #UMKMTUMBUHFISKALTANGGUH

TreaSumsel Fest 2025 mempertemukan kolaborasi, kreativitas, dan kepedulian fiskal melalui diseminasi KFR, forum pemberdayaan UMKM, bazar, serta Pitch Challenge dan Studentpreneur. Kegiatan ini membahas ekonomi-fiskal Sumsel, akses pembiayaan KUR-UMi, Digipay Satu, dan mendorong lahirnya wirausaha muda berdaya saing untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.



10 NOV | KEMENKEU MENGAJAR

Kegiatan Kemenkeu Mengajar di Sumatera Selatan dilaksanakan di delapan sekolah di Kota Palembang, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Pimpinan tinggi Kemenkeu turut hadir sebagai pengajar, termasuk Dirjen dan Sekretaris DJPK, serta Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumsel dengan antusiasme tinggi dari siswa SMPN 3 Palembang.



12 NOV | FGD TKD DAN PSN DI BAPPEDA

FGD Arah Kebijakan TKD dan Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Selatan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Kegiatan ini membahas arah kebijakan APBN dan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026, termasuk sinerginya dengan agenda prioritas nasional. Diskusi menyoroti tantangan fiskal daerah, perlunya efisiensi anggaran, percepatan realisasi program, serta penguatan fokus pada program prioritas agar pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan di tahun 2026 mendatang.

27 NOV | SHARING SESSION PENGELOLAAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Sharing session pengelolaan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi eksternal untuk menyambut TA berikutnya. Selama dua hari dan dalam 3 batch, peserta Bappeda dan BPKAD se-Sumsel memperdalam aspek hukum, strategi fiskal, pengelolaan kas, isu strategis, serta benchmarking money guna mendorong belanja daerah yang lebih efektif dan berdampak.



18-19 DES | HLM TPID OKI DAN OGAN ILIR

TPID kembali aktif melaksanakan rangkaian kegiatan pengendalian inflasi menjelang natal dan tahun baru melalui sidak pasar, operasi pasar murah, serta high level meeting, termasuk pada Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan ini bertujuan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, kesiapan distribusi, serta memperkuat koordinasi lintas pihak dalam menjaga stabilitas harga.



24 DES | KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2026

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran TA 2026, dilaksanakan pertemuan strategis bersama seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan anggaran berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.



31 DES | DIALOG AKHIR TAHUN KEMENKEU

Dalam forum strategis ini, disampaikan perkembangan dan kinerja keuangan negara hingga akhir Tahun 2025. Dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan bersama para Wakil Menteri, kegiatan ini menghadirkan dialog dengan empat Kepala Kantor Wilayah perwakilan regional sebagai sarana refleksi, evaluasi, serta penguatan arah kebijakan fiskal ke depan.





**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan**

**Jl. Kapten A. Rival No. 2, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I Kota
Palembang, Sumatera Selatan 30129**